BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal yang berjudul *Diplomasi Kebudayaan Menggunakan Kekuatan Kesenian,* I Wayan Dibia (2013 : 6) menjelaskan bahwa Diplomasi kebudayaan adalah suatu upaya untuk membangun dan mengelola hubungan antar bangsa dengan media seni dan budaya. Sejauh ini, istilah diplomasi lazim digunakan dalam konteks kebijakan luar negeri, yaitu terkait dengan hubungan antara negara dengan negara. Dalam kaitan ini istilah diplomasi bermakna membangun hubungan eksternal antarbangsa. Namun dalam skala yang lebih kecil, hubungan harmonis yang bebas konflik juga diperlukan untuk mendekatkan serta mempersatukan berbagai suku bangsa yang ada dalam satu negara kepulauan dan multi-etnis. Atas dasar pemikiran seperti ini konsep diplomasi kiranya bisa digunakan dalam konteks membangun hubungan internal antarbangsa. Diplomasi kebudayaan dapat menggunakan berbagai unsur yang terintegrasi dalam kebudayaan.

Di antara unsur-unsur kebudayaan yang ada, kesenian diyakini memiliki posisi yang sangat penting dan sentral serta mampu menjadi media yang efektif bagi sebuah diplomasi kebudayaan. Budayawan Bali I Wayan Geriya (1997 : 55) menyebut empat alasan, yaitu kesenian memiliki variasi dan keanekaragaman yang besar, kesenian memiliki wujud yang konkret dan cepat mengkhalayak, kesenian mudah menggugah apresiasi serta mampu menumbuhkan sikap saling

menghormati dan saling menghargai, dan kesenian memiliki nilai-nilai estetik yang asasi dan dapat merupakan bahasa universal yang mampu menembus berbagai batas dan perbedaan. Karena komunikasi kesenian melibatkan interaksi olah rasa dan kreativitas, dalam suasana yang pada umumnya menyenangkan, sehingga diplomasi kebudayaan sering disebut sebagai *soft power diplomacy*.

Dalam Tesis yang berjudul *Diplomasi Kebudayaan Perancis di China Melalui Alliances Francaise Periode 1989-2009* (2011) Zaenatien Oktaviati menjelaskan mengenai diplomasi yang dilakukan oleh Perancis dalam hal kebudayaan di China melalui *Alliances Francaise* (AF). Pembahasan mengenai diplomasi kebudayaan bukanlah satu hal yang baru. Penelitian-penelitian mengenai diplomasi kebudayaan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Dari beberapa penelitian yang ada di beberapa negara, Perancis sering menjadi salah satu contoh negara yang konsisten dalam melakukan diplomasi kebudayaan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh Perancis melihat adanya cara lain yang dapat dilakukan untuk memperoleh tujuan negara tanpa menggunakan ancaman atau paksaan melainkan melalui kerjasama.

Sebagai organisasi kebudayaan Pemerintah Perancis, AF mempunyai misi utama mempromosikan bahasa Perancis melalui kursus bahasa di dunia kepada setiap orang, memperkenalkan kebudayaan Perancis dan kebudayaan setempat melalui berbagai aspek budaya, dan mendukung keanekaragaman budaya dengan mengutamakan nilai-nilai semua budaya yang ada. Saat ini jaringan AF sudah terebar di lima benua dengan jumlah siswa kursus ratusan ribu orang. Pentingnya peranan AF dalam mempromosikan bahasa dan kebudayaan Perancis di dunia

dapat dilihat dari dana yang diberikan oleh pemerintah Perancis. Untuk menjalankan misi yang ada, AF memiliki program pengajaran bahasa Perancis dan kegiatan kebudayaan yang rutin dilakukan. Kebutuhan setiap orang yang ingin belajar bahasa Perancis juga menjadi perhatian dari program kursus bahasa yang diberikan AF. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diantara 15 AF yang tersebar di Cina, dua AF yaitu berada di Hongkong dan Macau. Sebagian besar peserta kursus tidak memiliki tujuan pendidikan tetapi sebagai salah satu bentuk kesenangan untuk bisa berbicara bahasa Perancis dan mengenal budaya Perancis. Oleh karena adanya perbedaan tujuan dari setiap orang di Cina dalam mengenal Perancis selain pengajaran bahasa Perancis, kegiatan kebudayaan juga menjadi promosi penting yang dilakukan oleh AF.

Diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh Perancis sebagai bentuk pengembangan dari *soft power* dapat memberikan dampak positif bagi kepentingan politik dan ekonomi. Dalam penelitian ini juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi jalinan kerjasama dan dapat memberikan kontribusi ekonomi dan politik.

Tinjauan pustaka ketiga dari jurnal *Book and Libraries as Instrumets of Cultural Diplomacy in Francophone Africa during Cold War* (2001 : 60) yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Mary Niles Maack, menjelaskan mengenai diplomasi kebudayaan melalui perpustakaan, penelitian tersebut berfokus pada tiga negara yaitu Perancis, Inggris, dan Amerika dengan waktu penelitian selama perang dingin. Strategi kebudayaan yang dilakukan di negara *Francophone* 'penutur bahasa Perancis' di Afrika dengan cara membangun pusat

kebudayaan yang memiliki perpustakaan. Negara Perancis sendiri mendirikan *Alliance Francaise* (AF), Inggris mendirikan *British Council* dan Amerika mendirikan *United Stated Information Agency.*

Pemilihan pendirian pusat kebudayaan dengan fokus perpustakaan tersebut dipengaruhi oleh tujuan masing-masing negara itu sendiri. Perbedaan tujuan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut salah satunya dapat dipengaruhi oleh faktor sejarah didirikannya pusat kebudayaan tersebut. Amerika memiliki tujuan membangun pemahaman dan dukungan posisi Amerika di dunia Internasional, Perancis memiliki tujuan mendorong para penulis Afrika untuk menulis buku-buku berbahasa Perancis sebagai bentuk pertukaran kebudayaan, sedangkan Inggris memiliki tujuan mendukung program pengajaran bahasa Inggris. Melalui program-program tersebut diketahui seberapa besar upaya yang dilakukan negara untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Dan hasil dari penelitian dari ketiga negara yang dilakukan oleh Mary Niles Maack disimpulkan bahwa Perancis adalah negara yang konsisten dalam menggunakan buku sebagai alat dari diplomasi kebudayaan.

Kemudian dalam jurnal *International Vutural elation: A Multi Country Comparison: Cultural Diplomacy* (2003 : 12-13) yang juga diterjemahkan kedalam bahsa Indonesia. Margaret J Wyzormsky dan Christopher Burgess menjelaskan bahwa istilah diplomasi kebudayaan *"Cultural Diplomacy"* ternyata tidak digunakan oleh semua negara. Jepang menggunakan istilah *Cultural exchange*, Austria, Swedia, dan Belanda menggunakan istilah *International Cultural Policy*, sedangkan Australian, Kanada, Singapura dan Inggris

menggunakan istilah *International Cultural Relation*, dan hanya Perancis yang menggunakan istilah *Diplomatte culturelle* "diplomasi kebudayaan". Istilah tersebut dipengaruhi oleh tujuan yang berbeda dari masing-masing negara. Jepang memiliki tujuan untuk memperkenalkan budaya Jepang kepada dunia. Australia, Austria, Kanada dan Inggris memperkenalkan citra nasional yang baru. Belanda mencoba mengembangkan pandangan internasional akan *cultural free port*. Singapura memiliki tujuan membangun citra negara global untuk informasi, komunikasi, dan seni. Swedia memiliki tujuan meningkatkan peranan di bidang ekonomi, sosial, demokrasi, budaya, dan kemanusiaan dalam bentuk kerjasama. Sedangkan Perancis memiliki tujuan untuk mempromosikan budaya Perancis dan bahasa Perancis dengan menekankan pluralisme kebudayaan dan keanekaragaman sebagai bentuk komitmen kerjasama kebudayaan secara internasional.

Perbedaan yang ada menyebabkan prioritas setiap negara menjadi berbeda-beda sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan diplomasi kebudayaan pun menjadi berbeda. Perbedaan tujuan yang ditunjukan pada penelitian Wyzormski dan Burgess ini mempengaruhi cara negara tersebut melaksanakan diplomasi kebudayaan. Namun di sisi lain ada kesamaan yang dapat dilihat dari perbedaan tujuan yang ada. Kesamaan tersebut yaitu masing-masing negara ingin memperlihatkan citra yang baik dalam memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan yang mereka miliki. Citra positif yang diperoleh di negara tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif di bidang yang lainnya, seperti yang dikatakan Wyzormski pada penelitiannya yaitu diplomasi kebudayaan memberi pengaruh positif akan citra suatu negara sehingga negara tersebut dapat

mengembangkan pasar dan membuka peluang perdagangan secara umum. Dengan demikian kontribusi yang diberikan oleh diplomasi kebudayaan kepada suatu negara dapat berhubungan dengan konsep ekonomi. Citra positif yang diperoleh suatu negara dengan melaksanakan diplomasi kebudayan mengindikasikan cara yang dilakukan negara tersebut tidak dengan cara kekerasan atau ancaman yang dikenal dengan *hard power*. Dengan demikian diplomasi kebudayaan lebih menggunakan cara kerjasama untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Wyzormsky dalam laporan penelitiannya, bahwa adanya pandangan para ahli mengenai argumentasi mengenai *soft power* dalam diplomasi kebudayaan.

Dari ke empat jurnal penelitian yang dijelaskan di atas, jika dihubungkan dan dibandingkan dengan penelitian *Diplomasi Kebudayaan Perancis di Indonesia Melalui Institut Francais d'Indonesie* (IFI) *Tahun 2012-2013* dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Penelitian	Isi Penelitian	Perbandingan
1.	Jurnal Diplomasi Kebudayaan Menggunakan Kekuatan Kesenian , oleh I Wayan Dibia (2013)	Kesenian diyakini memiliki posisi yang sangat penting dan sentral serta mampu menjadi media efektif bagi sebuah diplomasi kebudayaan.	IFI menarik minat masyarakat Indonesia melalui kegiatan Kebudayaan yang menampilkan kesenian Perancis
2.	Tesis Diplomasi Kebudayaan Perancis di China Melalui *Alliances Francaise* 1989-2009 oleh Zaenatien Oktaviati (2011)	Alliance Francais melakukan diplomasi kebudayaan dengan mempromosikan bahasa Perancis melalui pengajaran bahasa Perancis dan memperkenalkan kebudayaan melalui kegiatan rutin kebudayaan.	IFI mengadakan pengajaran bahasa Perancis dan juga mengadakan kegiatan kebudayaan.

3.	*Jurnal Book and Libraries as Instruments of Cultural Diplomacy in Francophone Africa during Cold War* oleh *Mary Niles Maack* (2001)	Perancis adalah negara yang konsisten dalam menggunakan buku sebagai alat diplomasi kebudayaan.	IFI membuka perpustakaan untuk umum yang berisikan buku-buku dengan Bahasa Perancis.
4.	Jurnal *A Multi Country Comparison : Cultural Dipomacy* oleh *Wyzormsky* (2003)	Perancis memiliki tujuan mempromosikan budaya dan bahasa Perancis dengan menekankan pluraslime dan keanekaragaman.	Keanekaragaman budaya Perancis dipromosikan melalui banyak jenis kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan IFI.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor,* memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*" Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa :

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Hal ini berarti hubungan internasional mencakup interaksi yang dilakukan oleh aktor suatu negara dalam kehidupan antarnegara. Adanya saling ketergantungan dari kedua negara Perancis dan Indonesia mendorong adanya kerjasama seperti yang didelegasikan dalam kesepakatan bilateral kedua negara,

hendaknya kerjasama tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. Perancis memiliki prioritas solideritas dan pengaruh terhadap Indonesia melalui IFI untuk membangun pertukaran pelajar dan mempengaruhi budaya serta bahasa Perancis di Indonesia, dan bagi Indonesia dengan kesempatan *study* ke Perancis dapat meningkatkan intelektual mereka sehingga dapat membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.

Kemudian Mochtar Mas'oed lebih jauh menjelaskan dalam buku nya *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi* bahwa :

> "tujuan utama studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku internasional, yakni perilaku para aktor negara maupun non negara dalam area transaksi internasional. Perilaku itu dapat berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya "(Mas'oed, 2002:29).

Ilmu hubungan internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya, ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya. Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang hubungan internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, sosial dan budaya. Demikian juga untuk menelaah hubungan internasional dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian hubungan internasional (Rudy, 2011:3).

Dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks. Kompleksitas hubungan internasional itu sesuai

dengan pendapat Jack. C Plano yang mengatakan bahwa hubungan internasional mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan (Plano, 1999:115).

Bidang sosial dan kebudayaan dapat masuk kedalam kajian ilmu hubungan internasional karna dalam penelitian ini hal yang dikaji adalah prioritas Perancis dalam meningkatkan pertukaran pendidikan dari Indonesia ke Perancis dan pengaruh penyebaran kebudayaan serta bahasa Perancis terhadap aspek sosial di Indonesia. Dan IFI berperan sebagai aktor yang menjembatani hubungan internasional di antara kedua negara tersebut.

2.2.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional (*National Interest*) merupakan dasar dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya melalui kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri berisi cara tertentu untuk membantu negara-negara mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam penelitian ini kepentingan nasional yang ingin dicapai Perancis melalui IFI Perancis ingin mempromosikan kebudayaan serta bahasa Perancis di Indonesia, melalui pertukaran pendidikan yang nantinya akan memberikan dampak positif dalam berbagai bidang di Perancis. Teuku May Rudy dalam buku *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global* menjelaskan bahwa:

> "Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara

> sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai Kepentingan Nasional" (Rudy, 2011 : 116).

Diplomasi dilakukan demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pada dasarnya, seorang diplomat India Kuno, dalam karyanya yang tersohor, *Arthasastra*, mengemukakan bahwa : "pencapaian kebijakan secara tepat akan memberi hasil yang menguntungkan" (Roy, 1991 : 5). Dijelaskan juga mengenai tujuan diplomasi, antara lain *acquisition* (perolehan), *preservation* (pemeliharaan), *augmentation* (penambahan), dan *proper distribution* (distribusi yang adil).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utama diplomasi adalah demi mengamankan kepentingan negara sendiri. Kepentingan nasional yang biasanya dimiliki suatu negara antara lain memajukan perekonomian, melindungi warga negaranya di negara lain, mengembangkan budaya, meningkatkan gengsi, menjalin persahabatan dengan negara lain, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan seperti di atas, negara membutuhkan instrumen atau sarana dalam berdiplomasi, baik dalam segi politik, ekonomi, budaya, maupun militer. Dari segi politik, negara pasti berdiplomasi demi mengamankan kebebasan politik dan integritas wilayahnya. Instrumen yang bisa digunakan dalam aspek ini antara lain dengan cara memperkuat hubungan dengan negara sahabat, memelihara hubungan yang harmonis dengan negara yang memiliki kesamaan kepentingan, dan mengajukan jalan perdamaian dengan negara-negara yang memusuhinya.

Dewasa ini, negara-negara sering bertukar kebudayaan, diantaranya dengan mengirim duta budaya ke luar negeri. "Tujuan diplomatik dengan mengirim

delegasi kebudayaan adalah untuk menunjukkan keagungan kebudayaan suatu negara, dan apabila mungkin, dapat digunakan untuk mempengaruhi pendapat umum negara yang didatangi" (Roy, 1991:12).

Jika negara A sudah terkesan dengan kebudayaan negara B, maka akan lebih mudah bagi negara B untuk menggalang dukungan negara A, jika sewaktu-waktu negara B ditimpa masalah. Selain mengirim delegasi kebudayaan ke luar negeri, penggunaan instrumen kebudayaan yang lain misalnya adalah mengadakan acara budaya atau seni di negara lain, mengadakan forum internasional terkait dengan pertukaran budaya, memberi beasiswa bagi warga negara lain yang berprestasi di bidang seni atau kebudayaan, membangun pusat kebudayaan di negara lain, dan sebagainya.

2.2.3 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan pemerintah untuk mengatur semua hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan negara lain.

Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri suatu negara, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif, seperti kebijakan untuk menetukan suatu strategi (Suryokusumo, 2004:7-8).

Maka dengan demikian hubungan internasional merupakan forum interaksi dari berbagai kepentingan-kepentingan nasional. Dalam interaksi itu pula setiap negara berupaya menegakkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya

dalam forum interaksi masyarakat internasional yakni dengan melalui kebijaksanaan politik luar negeri masing-masing.

Dalam menjalankan politik luar negeri, hubungan internasional menjelaskan beberapa pendekatan, yang salah satunya adalah pendekatan pemikiran strategis suatu negara atau pendekatan adaptif, salah satu tokoh pemikirnya adalah James N. Rosenau. Berkaitan juga dengan politik luar negeri yang dirumuskan oleh Perancis berdasarkan keadaan geopolitik Indonesia. Bahwa menurut teoritisi pendekatan ini lingkungan akan menimbulkan akibat-akibat khusus, terlepas dari tindakan apa yang dilakukan oleh negara tersebut, model ini akan memisahkan perkiraan kapabilitas yang dimiliki oleh sebuah negara dengan posisi geopolitiknya, keadaan geografis dan sebagainya. Menurut Rosenau politik luar negeri merupakan suatu mekanisme interaksi negara-negara dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Kondisi sebuah negara akan mempengaruhi politik luar negerinya. Negara yang memiliki lingkungan strategis pasti akan memiliki politik luar negeri yang berbeda, begitu juga dengan keadaan negara tujuan dimana politik luar negeri tersebut dilaksanakan, akan mempengaruhi perumusan politik luar negeri negara lain (Perwita & Yani, 2005: 62-63).

Ada beberapa langkah atau tahapan yang dilakukan oleh sebuah negara dalam proses politik luar negerinya. Langkah-langkah tersebut antara lain, pertama sebuah negara akan menetapkan semua tujuan dan kemana arah politik luar negerinya, serta mengumpulkan data-data penting seperti bagaimana kemampuan negaranya, kondisi dunia luar saat ini dan lainnya, tahap kedua adalah perumusan kebijakan dalam politik luar negeri untuk dapat mencapai

tujuan nasionalnya, biasanya hal ini akan dipengaruhi oleh faktor dalam negeri. Tahap selanjutnya yang dilalui oleh sebuah negara adalah keluarnya suatu kebijakan yang nantinya akan diterapkan, dimana dalam kebijakan tersebut terdapat serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebuah negara. Berikutnya negara akan melaksanakan politik luar negeri berdasarkan pada rumusan yang telah dibuatnya, hal ini dilakukuan dengan cara berhubungan dengan dunia luar, maka pasti akan muncul kemampuan baru sebuah negara dan tujuan lain yang hendak dicapai kembali, yang kemudian akan kembali pada proses awal yaitu *information assessment* (Perwita & Yani, 2005:60).

Politik luar negeri suatu negara ditunjukan untuk memajukan dan melindungi kepentingan negara itu. Fungsi utama diplomasi juga, adalah untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Dari situlah maka politik luar negeri dan diplomasi memiliki fungsi yang sama. Namun ada beberapa perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Di dunia yang terdiri dari banyak bangsa ini, untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional, setiap bangsa harus menentukan sikapnya terhadap bangsa lain dan arah tindakan yang akan diambil dan dicapai dalam urusan internasional. Pada saat dasar ini diletakan dan politik luar negeri dirumuskan, maka munculah peranan diplomat untuk melaksanakan keputusan itu dengan kegiatan-kegiatannya. Jadi apabila fungsi utama politik luar negeri adalah mengambil keputusan mengenai hubungan luar negeri maka tugas utama diplomasi adalah untuk melaksanakanya dengan baik dan efektif (Roy, 1991:34).

2.2.4 *Soft Power*

Soft Power yang dimiliki oleh suatu negara, pada dasarnya bergantung pada tiga sumber utama, yakni: budaya, nilai-nilai politis, dan terakhir kebijakan luar negeri (Nye, 2004:11).

Budaya adalah kumpulan nilai-nilai dan kebiasaan yang mempunyai arti bagi sebuah masyarakat. Budaya memiliki banyak manivestasi, dan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *high culture*, seperti sastra, seni, dan edukasi yang biasa ditunjukan bagi kalangan elit dan *popular culture* yang diperuntukan bagi masyarakat secara umum. Apabila budaya suatu negara memiliki nilai universal serta mempromosikan nilai dan kepentingan yang dibagi bersaman maka budaya tersebut dapat meningkatkan hasil yang diinginkan dengan citra yang tercipta (Nye, 2004:12).

Menurut Joseph S. Nye, JR mengenai *soft power* dalam bukunya *Soft Power: The Means to Success in World Politics* bahwa "*Soft power* merupakan kemampuan suatu negara untuk membentuk pola pikir negara lain supaya cenderung mengikuti apa yang diinginkan oleh negara pelaku *soft power* tersebut (Nye, 2004:5).

Kemudian Nye juga menjelaskan bahwa *power* datang dari sebuah ketertarikan :

> "Para pemimpin politik telah lama memahami kekuatan yang berasal dari daya tarik. Kemampuan untuk membangun yang dipilih cenderung dikaitkan dengan aset tidak berwujud seperti kepribadian yang menarik, budaya, nilai-nilai politik dan lembaga, dan kebijakan yang dipandang sebagai otoritas yang memiliki moral yang sah" (Nye, 2004 : 6).

Dari kutipan di atas, Nye menjelaskan bahwa terdapat tiga sumber *soft power* suatu negara, yakni kebudayaan, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negerinya. Joseph Nye berargumen bahwa disamping sisi nilai tradisi dan bangunan politik serta kebijakan luar negeri sebuah negara, budaya merupakan salah satu elemen *soft power* yang mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi bangsa lain. Ketiga sumber *power* ini sebagai kemampuan menciptakan pilihan-pilihan bagi orang lain, yakni kemampuan memikat pihak lain agar dapat memilih melakukan suatu hal yang kita kehendaki tanpa kita perlu untuk memintanya.

Ketika seseorang mengagumi bahkan tergila-gila dengan suatu budaya, ia bukan hanya akan mencari tahu tentangnya, tapi bahkan akan menyebarluaskannya, sehingga dikenal menjadi mode tersendiri bagi mereka. Budaya yang masuk akan dengan mudah mempengaruhi orang yang terobsesi tersebut.

Di Indonesia, IFI berkepentingan mensosialisasikan budaya, seni, citra, nilai, dan kebijakan negerinya kepada masyarakat Indonesia dengan berbagai cara lembaga tersebut melakukan diplomasi budaya untuk mecapai kepentingan nasional negaranya melalui program-program yang memikat masyarakat Indonesia tanpa harus memaksa, yakni dengan menggunakan pendekatan *soft power* seperti kursus bahasa, pemutaran film, pertunjukan seni, pemberian beasiswa, dsb. Selain itu, media-media mereka mamainkan peran penting dalam menggiring opini publik terhadap Perancis, negara yang mendirikan pusat kebudayaan tersebut.

2.2.5 Diplomasi

Banyak defenisi yang dapat dikutip dari para ahli ilmu hubungan internasional mengenai diplomasi. Ada para ahli yang menghubungkan diplomasi dengan perang, atau perang merupakan kelanjutan dari diplomasi dengan melalui sarana lain. Akan tetapi kebanyakan para ahli lebih menekankan keterkaitan diplomasi dengan negosiasi. Harold Nicholson (1942) dalam S.L.Roy (1991) mejelaskan :

> "diplomasi merupakan cakupan dari lima hal yang berbeda yaitu; (1) politik luar negeri, (2) negosiasi, (3) mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, (4) suatu cabang Dinas Luar Negeri, dan interpretasi yang kelima merupakan kualitas abstrak pemberian yang mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional"(Roy, 1991:3).

Dalam prakteknya diplomasi harus dibedakan dengan politik luar negeri, oleh karena itu diperlukan adanya batasan diantara kedua konsep tersebut. Dimana, diplomasi bukanlah merupakan kebijakan, tetapi merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa kerjasama satu sama lain (Roy, 1991:6).

Diplomasi merupakan cara-cara yang dilakukan dalam hubungan internasional melalui perundingan, yang mana dilaksanakan oleh para duta besar, yang merupakan pekerjaan atau seni dari diplomat. Praktek-praktek negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Dengan demikian diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya.

Menurut Kardinal Richeliu seorang negarawan Perancis yang ulung pada zamannya mengarahkan tujuan Perancis selama pemerintahan Louis XIV dan Groyius dalam S.L.Roy (1991), mengatakan bahwa :

> "seni negosiasi bukanlah suatu yang tergesa-gesa melaikan sesuatu yang permanen, perjanjian merupakan alat yang penting dari diplomasi, harus ditetapkan sesudah pertimbangan yang hati terhadap semua aspek, dan negosiasi tidak perlu berakhir dengan persetujuan, tetapi setiap pihak yang akan berunding harus mengetahui sejak awal bahwa pihak lain tersebut benar-benar mewakili hak kedaulatan di negerinya sendiri" (Roy, 1991:67).

Metode Perancis bertahan sebagai suatu model diplomasi dalam waktu yang lama. Selama periode ini bangsa Perancis memberikan penekanan yang besar pada instruksi tertulis yang diberikan kepada para duta besar. Instruksi ini memuat garis besar kebijaksanaan yang harus dicapai oleh duta besar. Suatu perhitungan menyeluruh tentang kondisi politik negara yang akan dituju juga diberikan. Instruksi itu juga menyertakan surat kepercayaan. Selama abad 17 dan 18 metode diplomasi Perancis menjadi demikian populer sehingga bahasa Perancis menjadi *lingua franca* diplomasi (Roy, 1991:68).

Tujuan dari diplomasi yang baik atau efektif adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri. Kepentingan terdepan tampaknya adalah pemeliharaan keamanan. Tetapi selain pertimbangan yang vital tentang keamanan nasional, terdapat tujuan vital yang lain antara lain memajukan ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan warga negara sendiri di negara lain, mengembangkan budaya dan ideologi, peningkatan prestise nasional, memperoleh persahabatan dengan negara lain, dan sebagainya. Secara luas tujuan ini bisa dibagi menjadi empat: politik, ekonomi, budaya dan ideologi (Roy, 1991:5).

Dalam penelitian ini jika ditinjau dari teori diplomasi, bahwa yang menjadi dasar suatu diplomasi adalah politik luar negri Perancis yang membuat kebijakan eksternal kebahasaan kemudian kebijakan tersebut di implementasikan terhadap hubungan bilateral Perancis dan Indonesia kemudian terjadi negosiasi antara para *state actor* untuk membicarakan mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut. Sehingga lebih jauhnya IFI yang merupakan lembaga dijadikan sebagai sarana diplomasi tersebut.

2.2.5.1 Diplomasi Publik

Diplomasi publik merupakan kunci dalam implementasi apa yang disebut dengan *Soft Diplomacy* menjadi alat utama diplomasi sekarang ini. Perkembangan diplomasi di era globalisasi menjadikan Diplomasi Publik itu sendiri semakin beragam. Kecenderungan pelaksanaan Diplomasi Publik dengan menggunakan aplikasi *Soft Diplomacy* dianggap efektif dan efisien karena mudah untuk dilakukan tanpa menelan korban dan menghabiskan biaya besar. Seiring berubahnya paradigma aktor hubungan internasional, pelaksanaan Diplomasi Publik melibatkan berbagai kalangn aktor non-pemerintah. Oleh karena itu, *Soft Diplomacy* merupakan bentuk nyata dari penggunaan instrumen selain tekanan politik, militer dan tekanan ekonomi, salah satunya yakni dengan mengedepankan unsur budaya dalam kegiatan diplomasi (Yudhantara, 2011:183).

Diplomasi publik '*second track diplomacy'*, didefinisikan sebagai upaya diplomasi yang dilakukan oleh elemen-elemen *non-government* secara tidak resmi (*unofficial*). Dalam hal ini *second track diplomacy* bukan berarti bertindak sebagai

pengganti *first track diplomacy*, akan tetapi turut melancarkan jalan bagi negosiasi. Selain itu peranan *second track diplomacy* ini juga untuk melancarkan persetujuan yang dilaksanakan oleh *first track diplomacy*, dengan cara mendorong para diplomat untuk memanfaatkan informasi penting yang diperoleh pelaku-pelaku *second track diplomacy*.

Menurut John W. McDonald (2012) dalam *Journal Conflictologi : The Institut for Multi-track Diplomacy* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, *Multi-track diplomacy* terdiri dari sembilan jalur yaitu sebagai berikut :

1. *Track 1* - Pemerintah, atau Perdamaian melalui Diplomasi. Menyangkut pendekatan diplomasi resmi, perumusan kebijakan, dan perdamaian.
2. *Track 2* - Non-Pemerintah/Professional, Perdamaian melalui Resolusi Konflik.
3. *Track 3* - Bisnis, atau Perdamaian melalui Perdagangan.
4. *Track 4* - *Private Citizen*, melalui Keterlibatan Perdamaian warga negara sipil.
5. *Track 5* - Penelitian, dan Pendidikan, atau perdamaian melalui Pembelajaran. Jalur ini mencakup: penelitian, seperti yang terhubung ke program universitas, pola pikir, dan minat khusus pada pusat penelitian.
6. *Track 6* - Aktivisme, atau Perdamaian melalui Advokasi.
7. *Track 7* - Agama, atau Perdamaian melalui Iman dalam tindakan.
8. *Track 8* - Pendanaan, atau Perdamaian melalui Pemberian *Resources*.
9. *Track 9* - Komunikasi dan Media, atau Perdamaian melalui Informasi.

Sistem ini mengharuskan semua *track* untuk akhirnya bekerja sama untuk membangun sebuah proses perdamaian yang akan berlangsung, itu merupakan

transisi dari *track* 1 untuk melacak 2 sulit dicapai , menjadi salah satu masalah utama yang harus dihadapi organisasi (Diamond, 2012:67-68).

Lima dari sembilan *track* tersebut yang digunakan Perancis dalam melakukan diplomasi kebudayaannya di Indonesia, dimulai dengan adaya negosiasi dalam pencapaian kerjasama bilateral, *privat citizen*, pelatihan dan pendidikan, pendanaan yang diberika Perancis dan jiga komunikasi serta media yang membantu Perancis dalam melancarkan diplomasi kebudayaannya.

2.2.5.2 Diplomasi Kebudayaan

Diplomasi kebudayaan merupakan fenomena lama, dalam beberapa literatur diplomasi kebudayaan disebutkan sebagai *Cultural Techniques in Foreign Policy* (Warsito & Kartikasari, 2007:1). Sehingga saat ini diplomasi kebudayaan banyak dipakai dalam menyampaikan kebijakan luar negeri suatu negara.

Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religiusm dan lain-lain yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Kemudian menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat (Simanjuntak, 2006:136).

Pada tanggal 26 Juli sampai dengan 6 Agustus 1982 telah diadakan *World Conference on Cultural Policies* di Mexico City yang disponsori oleh UNESCO. Konfrensi ini menghasilkan kesepakatan bahwa :

> "Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan bendabenda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melaksanakan kehidupan"(http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya, Konsep Kebudayaan diakses pada tanggal 14 April 2014 pukul 08:02 WIB).

Para ahli berpedapat untuk mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut :

1. Melville J. Herkovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu, alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga dan kekuasaan poltik.
2. Bronislaw Malinowski mengatakan 4 unsur pokok yang meliputi :
    a) Sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.
    b) Orgaisasi ekonomi
    c) Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-ptugas untuk pendidikan.
    d) Organisasi kekuatan (politik) (Koentjaraningrat, 1999:13).

Diplomasi menurut Geoff Berridge dan Alan James adalah penyelenggaraan hubungan antara negara-negara yang berdaulat melalui diplomat untuk mempromosikan negosiasi internasional (Berrige dan James, 2012:69). Namun secara konvensional, pengertian diplomasi adalah usaha suatu negara dalam

rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional (Roy, 1991:9).

Sedangkan definisi diplomasi budaya adalah sebuah pertukaran ide, informasi, seni, serta aspek kebudayaan lainnya dengan tujuan untuk menjaga sikap saling pengertian antara satu negara dengan negara lain maupun antar masyarakat (Cummings, 2003:1).

Eksibisi kebudayaan lebih sering berguna daripada pameran kekuatan militer. J.W. Fulbright dalam S.L.Roy (1991) berkomentar bahwa : "bentuk dunia, satu generasi sesudah ini akan lebih dipengaruhi oleh seberapa baik kita mengkomunikasikan nilai-nilai masyarakat kita kepada negara lain" (Roy, 1991:12).

Imperialisme kebudayaan merupakan suatu usaha untuk menakhlukan dan menguasai jiwa manusia serta sebagai sebuah instrumen untuk mengubah hubungan *power* antara kedua negara. Hubungan kebudayaan bisa banyak membawa dua bangsa menjadi lebih dekat. Hal ini sekarang sudah diakui. Ini sebabnya mengapa negara-negara sekarang sibuk memapankan hubungan-hubungan kebudayaan. Mereka menyelenggarakan program-program pertukaran kebudayaan dan membangun pusat-pusat kebudayaan permanen di negara lain. Pusat-pusat kebudayaan ini sekarang telah menjadi alat yang efektif (Roy, 1991:13).

Dalam buku *Diplomasi : Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang, Studi Kasus Indonesia* Kebudayaan, Tulus Warsito & Wahyuni Kartikasari mendefinisikan Diplomasi Kebudayaan sebagai berikut :

> "diplomasi kebudayaan adalah usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya propaganda, dll, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer. Beberapa literatur menyebutnya dengan propaganda" (Warsito & Kartikasari, 2007:4).

Diplomasi kebudayaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan di bidang budaya yang diintegrasikan ke dalam kebijakan politik luar negeri suatu negara dan pelaksanaannya dikoordinasikan sepenuhnya oleh Departemen Luar Negeri (Deplu). IFI yang mendapat dukungan penuh dari kementrian luar negeri Perancis, karna diplomasi kebudayaan juga harus didukung dengan kekuatan dan kewibawaan ekonomi, politik, dan militer. Oleh karena itu, diplomasi kebudayaan pada umumnya efektif dijalankan oleh negara-negara maju seperti Perancis. Seperti penjelasan diplomasi kebudayaan dalam buku Tulus Warsito, pada dasarnya ada dua hal penting dalam diplomasi kebudayaan. Pertama, diplomasi mikro bahwa diplomasi kebudayaan hanya menyangkut pemanfaatan kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri. Kedua, diplomasi makro bahwa pada saat dijelaskan bahwa diplomasi kebudayaan harus melibatkan kekuatan dan kewibawaan politik, ekonomi, dan militer, dan semua itu dimiliki oleh negara maju, maka efektivitas diplomasi kebudayaan dipengaruhi oleh ketidaksetaraan hubungan di antara negara-negara yang terlibat dalam diplomasi kebudayaan itu. Terdapat beberapa tujuan dari diplomasi kebudayaan :

1. Tujuan diplomasi kebudayaan lebih luas dari pada pertukaran kebudayaan, misalnya mengirim utusan keluar negeri untuk meperkenalkan kebudayaan suatu negara ke negara lain.

2. Membangun pengetahuan baru dan kepekaan terhadap negara lain untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dengan bangsanya.
3. Mempengaruhi pendapat masyarakat negara lain guna mendukung suatu kebijakan luar negeri tertentu (Soedjatmiko dan Thompson, 1976:406).

Kemudian Warsito menjelaskan konsep-konsep diplomasi kebudayaan, dilihat dari bentuk, tujuan dan sarana nya, adalah sebagai berikut :

1. Eksibisi atau pameran merupakan bentuk diplomasi paling konvensional mengingat gaya diplomasi modern adalah diplomasi secara terbuka.
2. Propaganda, merupakan penyebaran informasi mengenai kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun nilai-nilai sosial ideologis suatu bangsa.
3. Kompetisi, berupa olahraga, kontes kecantikan, ataupun kompetisi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.
4. Penetrasi, merupakan salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan melalui bidang-bidang perdagangan, ideologi, dan militer.
5. Negosiasi, dalam lingkungan budaya negosiasi dilakukan sebelum negosiasi tersebut dilaksanakan, karena lingkungan budaya tersebut akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan dalam suatu negosiasi yang akan dilaksanakan.
6. Pertukaran Ahli, merupakan salah satu jenis dari hasil negosiasi. Pertukaran ahli mencakup masalah kerjasama pertukaran budaya secara luas, yakni dari kerjasama beasiswa antar negara, sampai dengan pertukaran ahli dalam bidang tertentu.

Sarana diplomasi dibagi menjadi dua, yaitu, infrastruktur yang meliputi Elektronik, audio visual, dan media cetak dan suprastruktur yang meliputi

Pariwisata, para militer, pendidikan, kesenian, perdagangan, opini publik, dan olahraga. Sedangkan cara diplomasi kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung melalui kesepakatan bilateral, multilateral, konvensi internasional, dan secara tidak langsung, melalui negara ketiga atau melalui lembaga internasional (Warsito & Kartikasari, 2013 : 21-20).

Hubungan antara situasi, bentuk, tujuan, dan sarana diplomasi kebudayaan dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 2.2
Tabel Hubungan Antara Situasi, Bentuk, Tujuan, dan Sarana Diplomasi Kebudayaan

SITUASI	BENTUK	TUJUAN	SARANA
DAMAI	-eksibisi -kompetisi -pertukaran missi -negosiasi -konfrensi	-pengakuan -hegemoni -persahabatan -penyesuaian	-pariwisata -olah raga -pendidikan -perdagangan -kesenian
KRISIS	-propaganda -pertukaran misi -negosiasi	-persuasi -penyesuaian -pengakuan -ancaman	-politik -mass media -diplomatik -missi tingkat tinggi -opini publik
KONFLIK	-terror -penetrasi -pertukaran misi -boikot -negosiasi	-ancaman -subversi -persuasi -pengakuan	-opini publik -perdagangan -para militer -forum resmi -pihak ketiga
PERANG	-kompetisi -terror -penetrasi -propaganda -embargo -boikot -blokade	-dominasi -hegemoni -ancaman -subversi -pengakuan -penaklukan	-militer -para militer -penyelundupan -opini publik -perdagangan -supply barang konsumtif(termasuk senjata)

Sumber : buku *Diplomasi Kebudayaan* (Warsito & Kartikasari, 2013:31)

Keterangan : Semakin negatif hubungan antar dua (atau lebih) negara bangsa, maka semakin banyak/intensif bentuk diplomasi kebudayaan yang dipakai. Dan

dalam pengertian konvensional, diplomasi kebudayaan dikenal hanya pada waktu damai saja.

Kemudian, dijelaskan pula ada dua pendekatan yang dipakai oleh negara-negara berkembang dalam hubunganya terhadap kebudayaan modern dunia, yaitu yang pertama melaui konsep bipolaritas, atau dikotomi global dalam hal ini kebudayaan modern dunia yang digolongkan hanya dalam 2 (dua) kelompok, yakni maju dan berkembang, atau modern dan tradisional. Bahwa posisi negara yang sedang berkembang berada dibawah negara-negara maju, sehingga terdapat ketergantungan antara negara berkembang terhadap negara maju untuk men sejajarkan posisinya. Yang kedua, pendekatan Spektrum Perkembangan Kebudayaan, menjelaskan bahwa pusat kebudayaan modern di negara yag sedang berkembang sesungguhnya merupakan budaya dari pinggiran yang berpola kepada pusat-pusat budaya modern dunia (Warsito & Kartikasari, 2007 : 33-35).